



PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN

*National Slum Upgrading Program (NSUP) –
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*

Konsolidasi Persiapan Pelelangan Kegiatan NSUP/KOTAKU TA 2019
Jakarta, 25 – 27 Juni 2019



Outline

1. Overview Program KOTAKU
2. Pendekatan Penanganan Permukiman Kumuh: Infrastruktur Skala Lingkungan dan Infrastruktur Skala Kawasan
3. Sebaran Lokasi Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan
4. *Readiness Criteria* Kegiatan Infrastruktur Skala Kawasan
5. Status Pelaksanaan Kegiatan
6. Isu-isu Strategis



Program KOTAKU



Definisi Program

Program peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan Program

1. Menurunkan luas permukiman kumuh;
2. Mewujudkan kolaborasi penanganan kawasan kumuh dari berbagai stakeholder;
3. Menyediakan infrastruktur permukiman;

Sasaran Program

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;
3. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.

Pendekatan Penanganan Permukiman Kumuh

Dukungan Infrastruktur dan Layanan Investasi

SKALA KAWASAN

Dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur primer, sekunder dan pengembangan kawasan serta pembangunan infrastruktur penghubung/konektivitas jaringan tersier dan tingkat rumah tangga dengan infrastruktur primer/sekunder yang diidentifikasi dalam Dokumen SIAP/RP2KPKP.

Pekerjaan fisik dilaksanakan secara KONTRAKTUAL melalui Tender Jasa Konstruksi, sedangkan supervisi dilaksanakan oleh TMC.

SKALA LINGKUNGAN (PLPBK/ND)

Dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur tersier yang diidentifikasi dalam Dokumen RPLP/NUAP.

Dilaksanakan secara SWAKELOLA MASYARAKAT melalui BKM.

SISTEM JARINGAN INFRASTRUKTUR

Jaringan Jalan

Jaringan Drainase

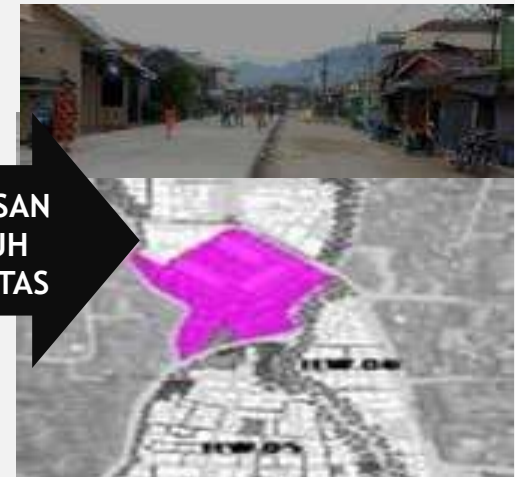
Jaringan Air Minum

Jaringan Air Limbah

Jaringan Persampahan

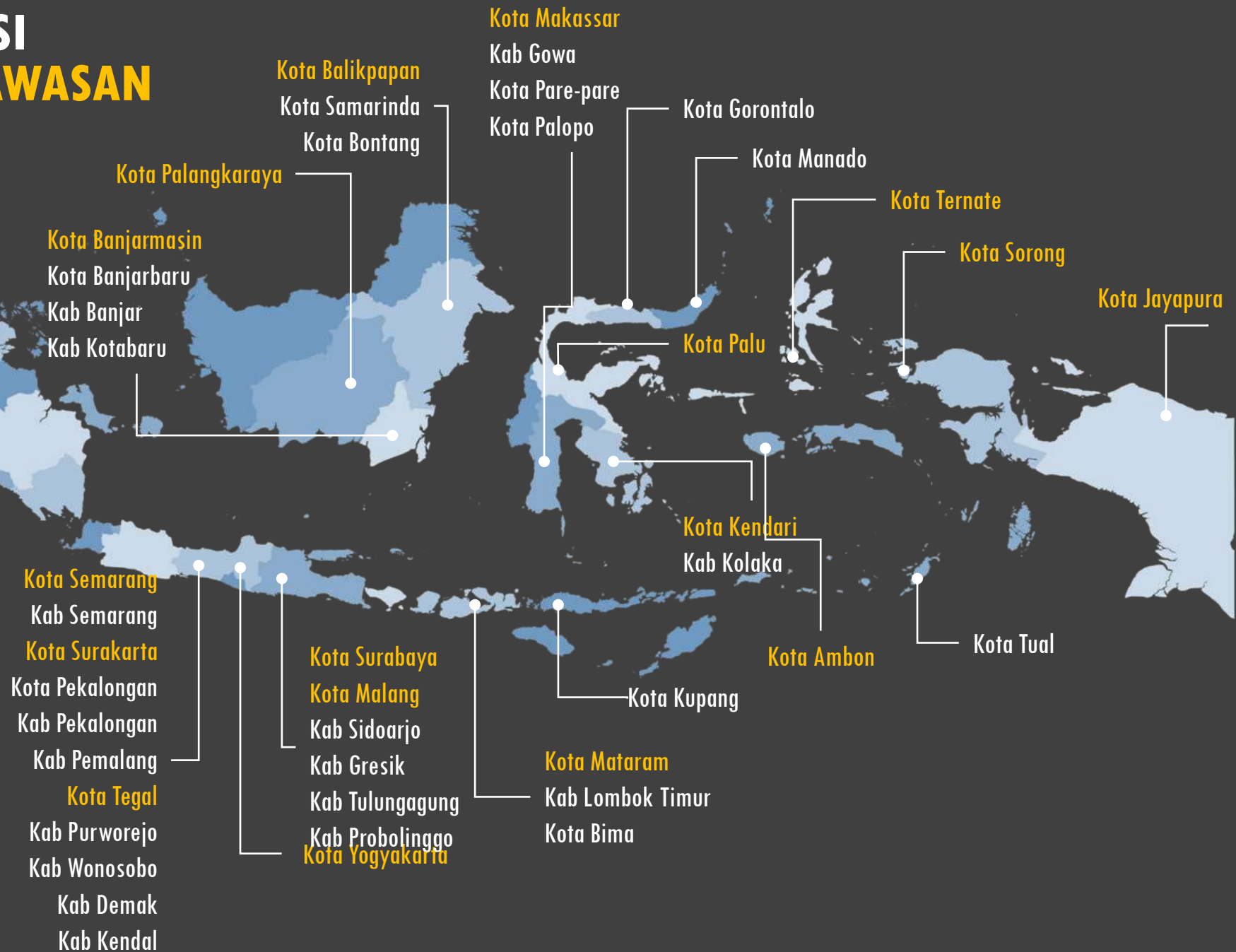
Jaringan Pengamanan Kebakaran

KAWASAN
KUMUH
PRIORITAS



SEBARAN LOKASI NSUP SKALA KAWASAN

44 KOTA/KAB



Readiness Criteria

1

Lokasi berada pada **KAWASAN STRATEGIS KOTA**, sesuai dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW/ RDTR di 269 Kab/Kota lokasi **KOTAKU**, memiliki luasan kumuh dan memiliki kejelasan status lahan;

2

Usulan infrastruktur berada di bawah kewenangan kota dan memberikan pelayanan yang terkoneksi dengan permukiman kumuh;

3

Memberikan kontribusi **PENGURANGAN LUASAN KUMUH** dengan skema **KOLABORASI/KETERPADUAN**;

4

Dokumen Teknis telah disediakan oleh Pemerintah Daerah secara **LENGKAP, SESUAI STANDAR TEKNIS** dan peraturan yang berlaku

Status Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

PROSES LELANG 2019	USULAN LELANG JUNI 2019	USULAN LELANG JULI 2019	USULAN LELANG DINI OKTOBER 2019	REVIEW KEBUTUHAN KEGIATAN SKALA KAWASAN
3	5	17	8	11
1. KOTA YOGYAKARTA 2. KOTA KENDARI 3. KAB KOLAKA	1. KOTA SURAKARTA 2. KOTA GORONTALO 3. KOTA SAMARINDA 4. KOTA BONTANG 5. KOTA JAYAPURA	1. KAB PEKALONGAN 2. KAB SEMARANG 3. KAB PEMALANG 4. KAB GRESIK 5. KOTA MALANG 6. KOTA MATARAM 7. KOTA KUPANG 8. KAB LOMBOK TIMUR 9. KOTA BANJARMASIN* 10. KAB KOTABARU 11. KOTA BALIKPAPAN 12. KOTA MANADO 13. KOTA PARE-PARE 14. KOTA PALOPO 15. KOTA TUAL 16. KOTA TERNATE 17. KOTA SORONG	1. KOTA PEKALONGAN 2. KOTA TEGAL 3. KAB BANJAR 4. KOTA AMBON 5. KOTA MAKASSAR 6. KAB GOWA 7. KOTA BIMA 8. KOTA PROBOLINGGO	1. KOTA SURABAYA 2. KOTA SEMARANG 3. KAB PURWOREJO 4. KOTA PALANGKARAYA 5. KOTA BANJARBARU 6. KAB WONOSOBO 7. KAB KENDAL 8. KAB DEMAK 9. KAB TULUNGAGUNG 10. KAB SIDOARJO 11. KOTA PALU

ISU-ISU PENYIAPAN SKALA KAWASAN

A. ISU-ISU UMUM

1. Penanganan Permukiman kumuh terkesan Sektoral belum fokus pada penanganan Kawasan;
2. Kualitas Perencanaan RP2KPKP belum Operasioanal, dan belum digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam penanganan kumuh diwilayahnya
3. Peran Kelembagaan Pokja PKP Kota/Kab. Belum Optimal
4. Kurangnya dukungan penyediaan Anggaran dan Konsultan oleh Pemda untuk merevisi dokumen sesuai verifikasi pusat
5. Lambatnya proses Penyediaan lahan yang Clear & Clean dan penyusunan LARAP oleh Pemda

B. ISU-ISU PEMILIHAN LOKASI

1. Pengusulan lokasi belum memperhatikan nilai strategis kawasan (kajian kebijakan tata ruang dan sektoral)
2. Pengusulan lokasi belum memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi baru
3. Pengusulan lokasi belum menyertakan rekomendasi teknis dari lembaga terkait seperti BBWS, DLH,dll terkait lahan yang clear and clean
4. Penataan hanya menampilkan beautification, belum sampai pada perubahan struktur kampung (peremajaan), didukung misalnya melalui land consolidation untuk menata kepadatan dan ketidakteraturan bangunan.



ISU-ISU PENYIAPAN SKALA KAWASAN

C. ISU-ISU DESAIN KAWASAN

1. Belum dilengkapi masterplan kawasan secara menyeluruh pada semua aspek kekumuhan yang mengacu pada blueprint masing-masing sektor.
2. Belum dilengkapi konsep rencana kawasan per zoning yang mempunyai tema dan ikon kawasan yang terintegrasi dengan infrastruktur eksisting serta mempertimbangkan sasaran penuntasan kumuh
3. Konsep perubahan wajah belum terintegrasi antara skala kawasan dengan skala lingkungan
4. Belum mempertimbangkan kajian sosial, budaya dan ekonomi setempat
5. Belum mempertimbangkan kajian pengadaan lahan (UKL/UPL, RPL, LARAP)
6. Belum dilengkapi roadmap terkait berapa lama penyelesaian penataan kawasan

D. ISU-ISU PENYUSUNAN DED KEGIATAN

1. DED kualitasnya kurang memenuhi standar
2. DED tidak didukung dengan data dan analisis teknis seperti Analisa kapasitas pelayanan dan kekuatan/keamanan bangunan
3. RAB belum sepenuhnya mengacu pada Standar Penyusunan RAB yang ditetapkan oleh PUPR (Permen PUPR No. 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan bidang Pekerjaan Umum



ISU-ISU PENYIAPAN SKALA KAWASAN

E. ISU-ISU PERSIAPAN DOKUMEN LELANG / TENDER

1. Sesuai Loan Agreement NSUP, proses pemilihan penyedia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 system versi 3.6 dengan menggunakan standard dokumen pemilihan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 21 tahun 2015 tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk pekerjaan konstruksi melalui Pelelangan Umum (NCB) sedang Peraturan Presiden yang berlaku saat ini bernomor 16 Tahun 2018 dengan menggunakan system versi 4.3, disebabkan karena adanya perbedaan ini maka ada beberapa balai yang menunda proses tender.
2. Dalam melaksanakan pemilihan penyedia paket NSUP dilakukan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dimana panitia pokja ini akan dibentuk dengan memilih anggota dari lintas Ditjen (Cipta Karya, Bina Marga dan Sumber Daya Air).
3. Terkait persetujuan Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Kontrak (MYC) maka :
 - i. Proses Pemilihan Penyedia untuk pekerjaan tahun jamak dimulai setelah PA menyetujui bahwa pekerjaan tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam kontrak tahun jamak.
 - ii. Kontrak tahun Jamak baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PA atau dari Menteri Keuangan,sesuai kewenangan yang diatur dalam PMKNo. 60/PMK.02/2018
4. Pemahaman pokja yang baru terbentuk di BP2JK terhadap harmonisasi dokumen NCB masih bervariasi dan mekanisme tersebut merupakan hal baru bagi mereka;





TERIMAKASIH

KOTA TANPA KUMUH – NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM

kotaku.pu.go.id  [kotakunasional](https://twitter.com/kotakunasional)  [kotaku.nasional](https://www.instagram.com/kotaku.nasional)  [kotaku nasional](https://www.facebook.com/kotaku.nasional)  [kotakunasional](https://line.me/tv/kotakunasional)

Referensi

1. **Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2019** tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. **Perka LKPP Nomor 21 Tahun 2015** tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) Dengan Sumber Dana Dari Bank Dunia
4. **Surat Edaran DJCK No. 40/SE/DC/2016** tentang Pedoman Umum Program KOTAKU
5. Panduan Penyusunan RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)
6. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Kotaku Tingkat Kota
7. Pedoman Operasi Standar (POS) Infrastruktur Skala Kawasan
8. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial
9. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
10. *Environmental and Social Management Framework*

Komponen Program

KOMPONEN-1

Pengembangan Kelembagaan, Strategi dan Kebijakan

KOMPONEN-2

Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi

KOMPONEN-3

Pendanaan Investasi Infrastruktur dan Pelayanan Perkotaan:

- Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota termasuk dukungan pusat pengembangan usaha-
- Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan-

KOMPONEN-4

Dukungan Pelaksanaan dan Bantuan Teknis

KOMPONEN-5

Dukungan Program/Kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana

Peran dan Tanggung Jawab

Pokja PKP Kab/Kota

- **Penyusunan Memorandum Program**
 - Penyiapan dana kolaborasi penanganan
- **Penyiapan lokasi kawasan sesuai Readiness Criteria**
 - Penyusunan usulan kegiatan dan pengajuan usulan kepada Satker PKP Provinsi dan PMU
- **Penyiapan dana untuk konsultan perencanaan**
 - Penyusunan perencanaan sesuai dengan RTRW dan dokumen kota/ berbasis kawasan lainnya
 - Penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED, RAB)
- **Penyiapan lahan clear & clean**
 - Penyusunan dokumen dan pemastian pengelolaan dampak sosial (LARAP, Rencana Penyiapan Lahan) dan pengelolaan dampak lingkungan (SPPL atau UKL/UPL)
 - Revisi dokumen perencanaan teknis dan LARAP
- **Menerima aset dan melaksanakan pengelolaan**

Balai PPW Provinsi

- **Pendampingan dan pengendalian dalam proses perencanaan sampai dengan serah terima aset & pengelolaan**
 - Ekspos usulan kegiatan kota/kab
 - Pengajuan usulan kebutuhan anggaran untuk kota/kab yang siap lelang kepada PMU
 - Monitoring dan evaluasi
- **Berkoordinasi dengan Balai P2JK Provinsi untuk pelaksanaan lelang paket pekerjaan konstruksi**
 - Mengajukan daftar paket lelang kepada Balai P2JK
 - Berkoordinasi dengan pokja pemilihan untuk menginput STEP
 - Memantau dan melaporkan kepada PMU mengenai kemajuan proses pelelangan oleh pokja pemilihan

PMU

- **Penyusunan kebijakan terkait penanganan skala kawasan**
- **Pembinaan terhadap Pokja PKP Kota/Kab dan Satker PKP Provinsi**
 - Melaksanakan seleksi dan verifikasi usulan kegiatan skala kawasan kota/kab
- **Penyiapan anggaran**
 - Melaksanakan revisi DIPA untuk pengalokasian kebutuhan anggaran untuk kota/kab yang siap lelang
 - Mengajukan procurement plan kepada lender (World Bank)
- **Monitoring dan evaluasi**

Technical Assistance : Tanggung Jawab Konsultan

Koordinator Kota

- 1) **Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota terkait:**
 - a. Masterplan Kawasan, Siteplan Kawasan dan Memorandum Program;
 - b. Penyusunan DED dan Dokumen safeguard
 - c. Pendampingan Perda Kumuh, Rencana Aksi Daerah (RAD)
 - d. Memberikan planning advise kepada OPD Teknis terkait sesuai kebutuhan justifikasi kriteria;
- 2) **Fasilitasi Kolaborasi Penanganan Kumuh Skala Lingkungan yang Terintegrasi dengan Skala Kawasan;**
- 3) **Memastikan dukungan APBD** untuk perencanaan skala kawasan, pemeliharaan dan pengembangan pelayanan asset infrastruktur;
- 4) **Memastikan infrastruktur terpilih mempunyai O&M yang jelas** (sumber dana dan dinas terkait);
- 5) **Fasilitasi Serah Terima Pengelolaan Aset kepada Pemerintah Kab/Kota.**

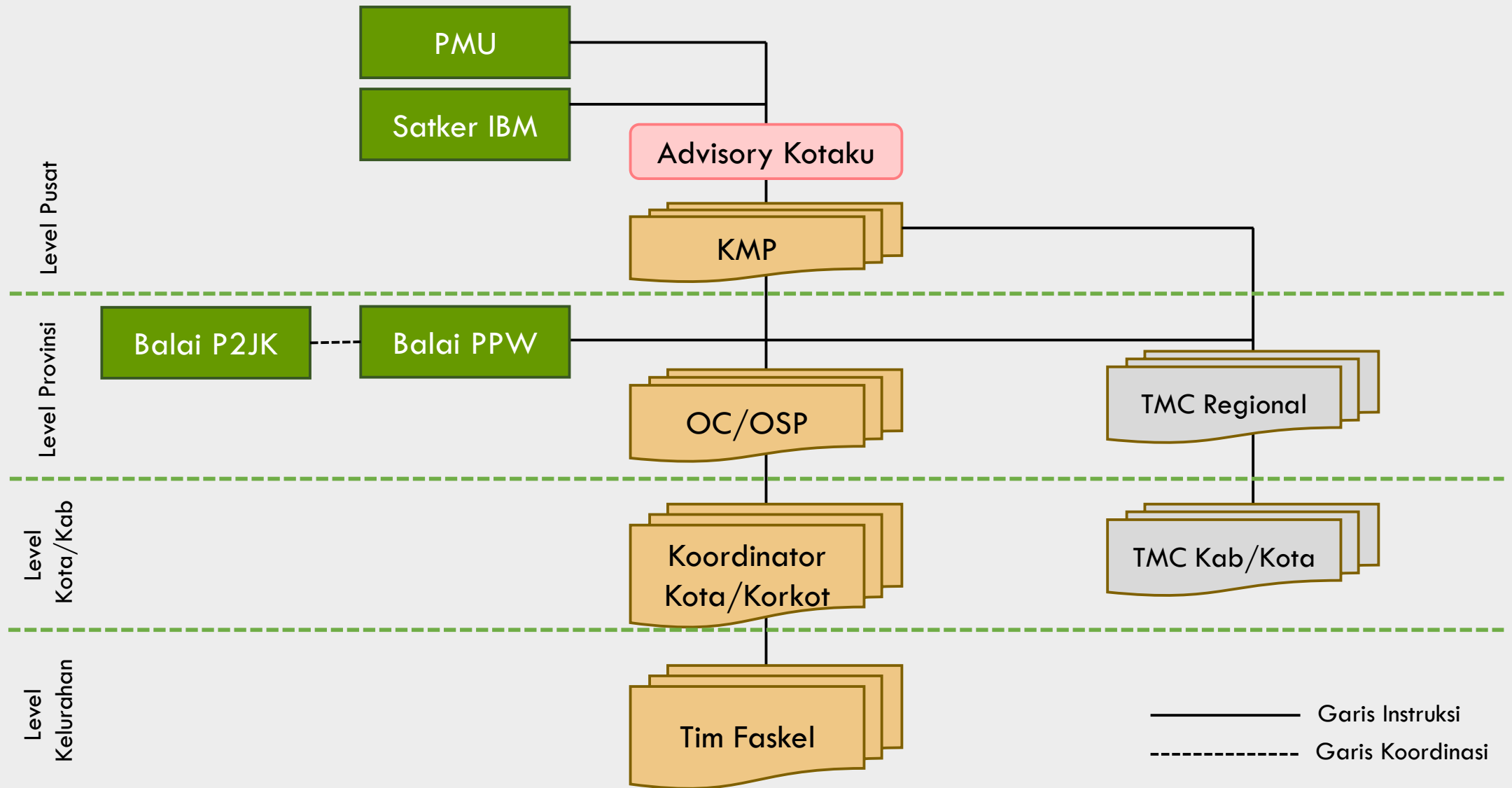
OSP Provinsi

- 1) **Memastikan Tim Korkot memahami kriteria seleksi kegiatan skala kawasan;**
- 2) **Memastikan adanya Advice Planning** dari OPD Teknis terkait sesuai kebutuhan justifikasi kriteria;
- 3) **Memastikan Usulan Kegiatan** telah melalui proses seleksi oleh Pokja PKP Kota/Kab;
- 4) **Memastikan tersedia dokumen perencanaan Kawasan**, termasuk dokumen Teknis (DED, RAB, RKS, Dok. Safeguards dan penyiapan lokasi) yang disiapkan oleh Pemda;
- 5) **Memfasilitasi Koordinasi** Pokja PKP Kota dengan Satker BPPW Provinsi;
- 6) **Melakukan Verifikasi Usulan Kegiatan** sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
- 7) **Memastikan dokumen Safeguards** yang diperlukan telah tersedia (SPPL/UKL-UPL/LARAP/Penyiapan Lahan);
- 8) **Memantau proses pelelangan** kegiatan skala Kawasan

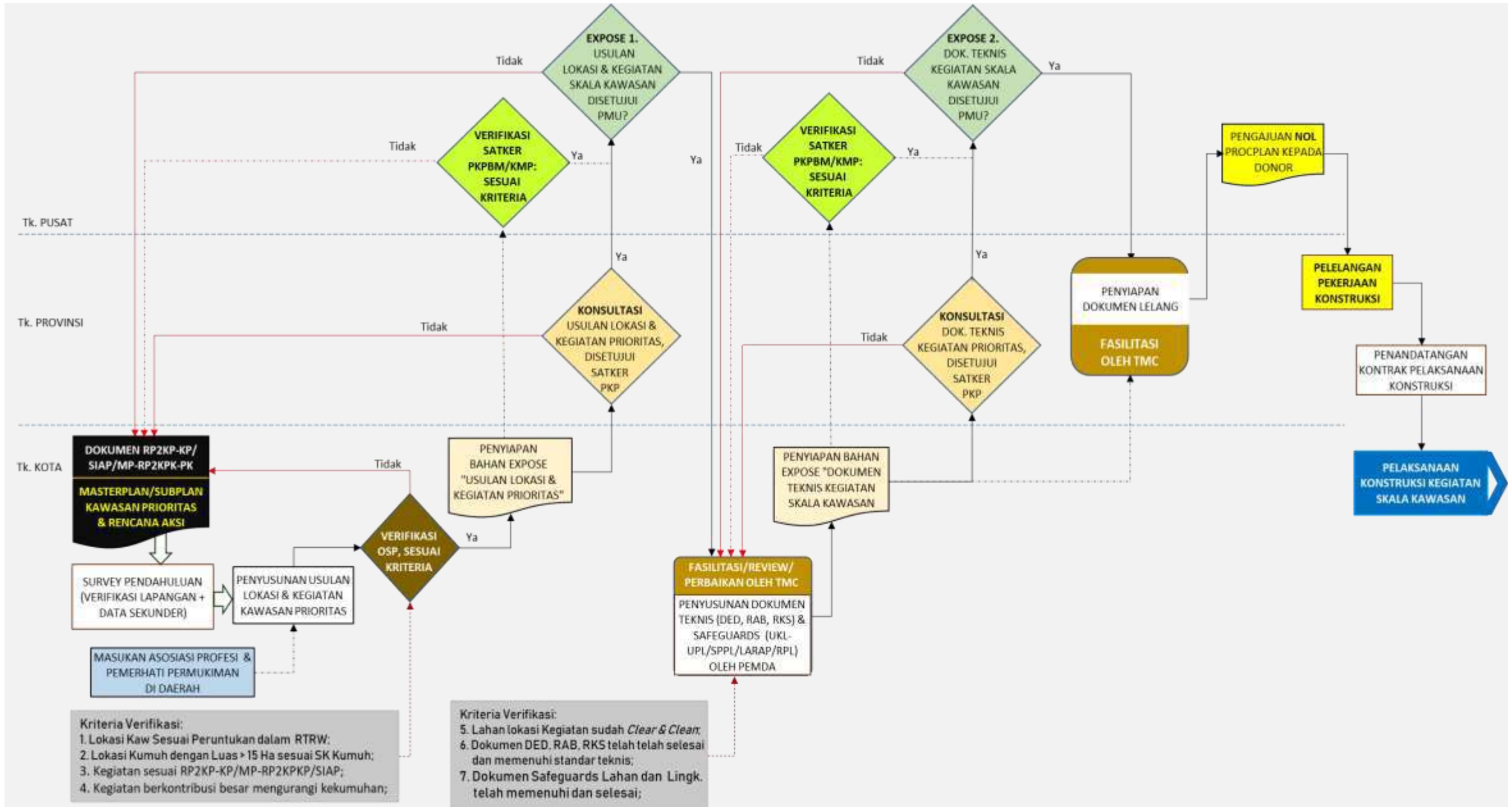
TMC Regional & Kab/Kota

- 1) **Melakukan review dokumen perencanaan teknis** yang disusun oleh Pemda sesuai standar teknis dan kriteria yang ditetapkan, memberikan rekomendasi teknis, termasuk penyempurnaan dokumen teknis yang diperlukan (bila ada);
- 2) **Memantau proses pelelangan kegiatan skala Kawasan;**
- 3) **Melakukan Supervisi pelaksanaan konstruksi** kegiatan infrastruktur skala Kawasan;
- 4) **Memastikan pelaksanaan infrastruktur skala kawasan Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Biaya dan Tertib Administrasi Proyek;**
- 5) **Konsolidasi data investasi dan capaian KPI skala kawasan ke SIM**

Tata Peran dan Pola Kerja



Mekanisme Pengusulan dan Persetujuan Usulan Kegiatan



Instrumen Verifikasi Usulan

1. Kesesuaian Penentuan Lokasi

2. Kesesuaian Usulan
Infrastruktur

3. Kesiapan Dokumen Teknis

4. Kesiapan Pelelangan

CHECKLIST 1: Kesesuaian Penentuan Lokasi

No	Aspek	Jabaran Aspek	Checklist
1	Kesesuaian dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW/RDTR	Lahan permukiman sesuai dengan peruntukan tata ruang	✓
		Jika lokusnya berada dalam kabupaten, lokasi berada di daerah administrasi kelurahan/ desa urban	✓
		Mengacu pada RTRW yang telah diperdakan/ dilegalkan	✓
2	Karakteristik lokasi/ kawasan	Lokasi termasuk dalam SK Kumuh Bupati/ Walikota	✓
		Lokasi memiliki LUASAN KUMUH BESAR (>15 HA) dan memiliki potensi pengurangan kumuh besar jika ditangani	✓
		Merupakan lokasi PKN/ KSN, atau kawasan memiliki FUNGSI STRATEGIS terhadap pengembangan kota/ kawasan di sekitarnya	✓
		Kawasan terkoneksi dengan lokasi sekitarnya dari segi aksesibilitas, sekuritas, dst	✓
3	Legalitas Kepemilikan Lahan	Legalitas kepemilikan (SHM/ HGU/ Ijin Pakai) <i>Ctt: KOTAKU tidak memberikan investasi infrastruktur di lahan yang belum clean & clear</i>	✓
4	Dukungan Kebijakan Kota/ Kab	Pemda telah memiliki Perda Kumuh yang sudah dilegalkan dan dapat menjadi acuan perencanaan	✓
		Pemda telah memiliki perencanaan sektor untuk pemenuhan infrastruktur dasar (7 aspek) yang dibuktikan dengan blue-print sektor	✓
		Pemda sudah memiliki kebijakan mengenai pengadaan tanah dan atau relokasi* <i>optional</i>	✓
		Pemda sudah memiliki <i>roadmap</i> / skenario penanganan kumuh kota/ kabupaten	✓

CHECKLIST 2: Kesesuaian Usulan Infrastruktur

No	Aspek	Jabaran Aspek	Checklist
1	Ketersediaan Dokumen Perencanaan	RP2KPKP/SIAP/MP-RP2KPKP tersedia dan telah dilegalkan	✓
		Peta perencanaan sektoral level kota/ kab tersedia (disajikan dalam peta tematik kawasan)	✓
		Masterplan Kawasan tersedia	✓
		Siteplan Sub-Kawasan tersedia	✓
2	Profil Kumuh Kawasan	Baseline Numerik Permasalahan Kumuh (level kelurahan)	✓
		Skoring Permasalahan Kumuh	✓
3	Analisis Kawasan	Analisis GAP kekumuhan antar aspek/ sektor tersedia	✓
		Analisis status kepemilikan tanah tersedia	✓
		Analisis kebutuhan penanganan, cakupan layanan, dan interkoneksi jaringan tersedia <i>Ctt: infrastruktur yang akan dibangun berada dalam jaringan kota, yang kewenangan pengelolaannya dimungkinkan dari pemda kota/kabupaten</i>	✓
		Analisis keterpaduan penanganan kumuh yang disajikan dalam peta keterpaduan	✓
4	Desain Kawasan	Usulan kegiatan menangani permasalahan utama kekumuhan (GAP>50%), penanganan kumuh tuntas di semua aspek, dan proyeksi skor kekumuhan akhir <19 <i>Ctt: sudah memperhitungkan kegiatan kolaborasi</i>	✓
		Memiliki TEMA KAWASAN yang sesuai dengan rencana dan program yang dikembangkan Pemda (mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level kota/kab)	✓
		Sudah mempertimbangkan INTERKONEKSI jaringan dan layanan infrastruktur	✓

CHECKLIST 2: Kesesuaian Usulan Infrastruktur

No	Aspek	Jabaran Aspek	Checklist
	Desain Kawasan	Terdapat PERUBAHAN WAJAH KAWASAN jika infrastruktur dibangun/ kawasan ditata (disajikan dengan gambar 3D/ animasi/ ilustrasi before-after (montage)	✓
		Desain kawasan menonjolkan KEKHASAN WILAYAH / local wisdom dan inovasi	✓
		Desain kawasan memberikan ruang dan PELUANG PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI lokal	✓
5	Timeline Kegiatan	Timeline pentahapan penanganan kawasan multisektor tersedia (dan disahkan pemda)	✓
		Timeline tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemeliharaan yang ditandatangani Ketua Pokja PKP dan Satker PKP Provinsi sebagai KPA	✓
6	Dukungan Pemda	Kesiapan pendanaan APBD untuk penyusunan DED	✓
		Kesiapan pendanaan APBD untuk penyusunan dok.safeguard lingkungan (SPPL/ UKL-UPL/ AMDAL) dan dok.safeguard sosial (LARAP/LARPF atau dokumen sejenis)	✓
		Kesiapan pendanaan APBD jika terjadi penggantian kompensasi/ relokasi sementara/ relokasi menetap jika terdapat WTP *optional	✓
		Kesiapan Pemda menerima dan memelihara asset melalui Surat Pernyataan Kesediaan Menerima dan Memelihara Aset	✓

CHECKLIST 3: Kesiapan Dokumen Teknis (DED)

No	Aspek	Jabaran Aspek	Checklist
1	Desain Konstruksi	Desain konstruksi sesuai dengan standar teknis	✓
		Desain konstruksi ramah lingkungan dan telah mempertimbangkan pengguna berkebutuhan khusus	✓
		Telah mempertimbangkan pilihan jenis konstruksi dan cakupan pelayanan, serta menyertakan perhitungan teknis konstruksi	✓
		Menggunakan teknologi/ produk Balitbang PUPR untuk perumahan & permukiman (RCMS, RISHA, biofilter apung, dll) <i>*optional</i>	✓
2	Kelengkapan Dokumen Teknis Konstruksi	Siteplan Kawasan skalatis	✓
		Gambar kerja lengkap (mencakup gambar siteplan infrastruktur, denah, tampak, potongan, gambar rencana struktur, rencana utilitas, dan gambar detail), dengan skala sesuai standar/ kebutuhan	✓
		RAB sesuai permen PUPR no 28/PRT/M tahun 2016, item pekerjaan dan perhitungan volume pada RAB sesuai/sinkron dengan gambar	✓
		Spesifikasi Teknis sesuai dengan gambar	✓
		Master schedule dan Kurva S Konstruksi	✓
		Dokumen teknis telah disahkan/ ditandatangani oleh pihak terkait	✓
3	Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Dampak Sosial & Lingkungan, dan dokumen pendukung lainnya	SPPL/ UKL-UPL/ AMDAL telah tersedia	✓
		LARPF/ LARAP/ Rencana Penyiapan Lahan telah tersedia	✓
		Dokumen pendukung lainnya (misal: SOP Operasional dan Pemeliharaan TPST, dst)	✓

CHECKLIST 4: Kesiapan Pelelangan

No	Aspek	Jabaran Aspek	Checklist
1	Kesiapan Dokumen Lelang	Dokumen lelang sudah lengkap dan tidak ada revisi	✓
		Dokumen safeguard lingkungan (SPPL/UKL-UPL) telah disetujui DLH	✓
		Dokumen LARAP sudah disetujui PMU dan Bank Dunia, serta sudah selesai atau dalam proses realisasi rencana aksi <i>*optional</i>	✓
		Standard Bidding Document telah disesuaikan dengan ketentuan lender dan telah selesai disusun	✓
		Jadwal lelang dari Pokja ULP telah disetujui PMU dan Satker PKP Provinsi setempat	✓
2	Pendanaan Infrastruktur Skala Kawasan	Alokasi DIPA untuk kontrak jasa konstruksi telah tersedia	✓
		Alokasi DIPA untuk kontrak jasa konsultan supervisi telah tersedia	✓
3	Kelembagaan Pokja ULP	Pokja ULP sudah terbentuk dan di-SK-kan	✓
		BOP Pokja ULP sudah tersedia	✓
		Pokja ULP sudah dilatih/ diberikan pembekalan oleh PMU dan Bank Dunia	✓
4	Kesiapan Konsultan Supervisi	<i>Tim supervisi TMC sudah dimobilisasi</i>	✓

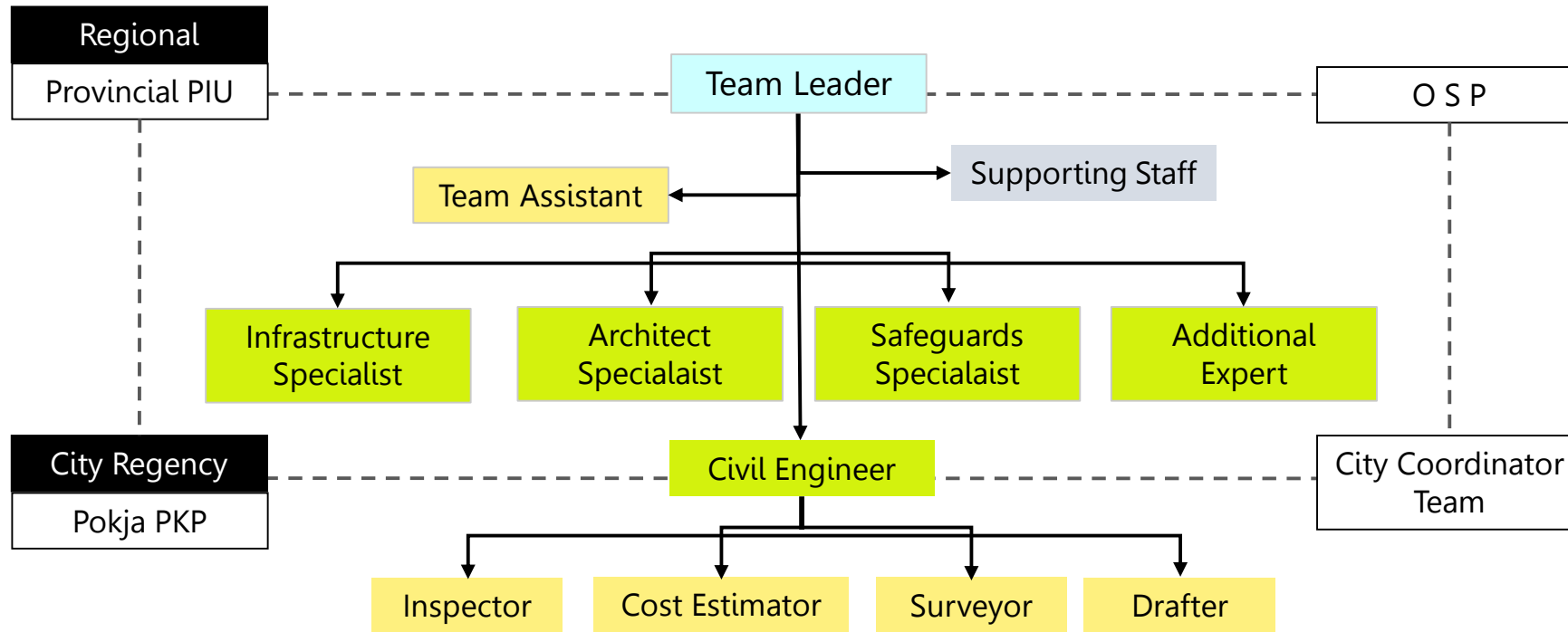
RUANG LINGKUP PENUGASAN TMC DAN OSP

TAHAPAN PROGRAM	SCOPE of WORKS OSP	SCOPE of WORKS TMC
PERSIAPAN	<ul style="list-style-type: none"> • PENYIAPAN DAN SOSIALISASI • BASELINE SURVEY DAN PROFIL PERMUKIMAN 	
CAPACITY BUILDING	<ul style="list-style-type: none"> • PELATIHAN SAFEGUARD, PENGADAAN, STANDAR TEKNIS • PELATIHAN & SERTIFIKASI TUKANG 	
PERENCANAAN	<p>PERENCANAAN KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan Kota • Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Permukiman • Pendampingan Perda Kumuh, Rencana Aksi Daerah (RAD) • Masterplan Kawasan, Siteplan Kawasan & Memorandum Program 	<p>PERENCANAAN TEKNIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review Penyusunan DED Skala Kawasan • Verifikasi dan review dokumen safeguard
	<p>PERENCANAAN PERMUKIMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan Permukiman & Lingkungan terkonsolidasi dg perencanaan Kota 	<p>PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Dokumen Lelang • Dukungan Proses & dokumentasi lelang
PELAKSANAAN KONSTRUKSI	<p>PELAKSANAAN KOLABORASI KEGIATAN PERMUKIMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi Infrastruktur Penanganan Kumuh Skala Permukiman yang Terintegrasi dengan Skala Kawasan • Kolaborasi Infrastruktur Pencegahan Kumuh • Kolaborasi Livelihood 	<p>PELAKSANAAN KONSTRUKSI SKALA KAWASAN PRIORITAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supervisi Teknis • Administrasi Proyek
KEBERLANJUTAN	<p>PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN (O&P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan dukungan APBD untuk pemeliharaan dan pengembangan pelayanan aset • Terbentuknya Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di tingkat Komunitas • Pelaksanaan audit dan tindakan lanjut BPKP 	<p>HANDLING OVER INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pemda dalam serah terima aset • Dokumentasi serah terima aset
SIM & WEB	<p>MANAGEMENT DATA DAN INFORMASI NSUP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Capaian KPI NSUP • Database • Profil Permukiman • Web GIS 	<p>KONSOLIDASI DATA SKALA KAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi data investasi dan capaian KPI skala kawasan ke SIM

Ruang Lingkup Tugas Lainnya dan/atau Ruang Lingkup Tugas Tambahan yang ditetapkan oleh PPK/Satker dan PMU KOTAKU

No	SCOPE OF WORKS FOR TMC
1	Verifikasi DED Skala Kawasan yang disiapkan Pemda sesuai kelayakan standar teknis.
2	Memastikan terpenuhinya pengamanan dampak lingkungan dan social.
3	Membantu penyiapan dokumen pengadaan
4	Melaksanakan supervisi pekerjaan fisik skala Kawasan
5	Konsolidasi Database
6	Membantu Alih Kelola Asset ke Pemerintah Daerah

Jika DED kegiatan infrastruktur skala Kawasan yang dipilih belum disiapkan oleh pemerintah daerah, TMC harus melakukan semua kegiatan yang diperlukan untuk ketersediaan DED dimaksud.



- Professional Staff
- Sub Professional Staff
- Supporting Staff
- Coordination line
- Command line